

Jurnal Ekonomi dan Bisnis

www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/iebi

MENELISIK KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Syafnita

Fakultas Ekonomi , Universitas Pekalongan
nita_syafri@yahoo.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 8 February 2021

Received in revised form:

18 March 2021

Accepted: 18 March 2021

Available online: 31 March 2021

Keywords: Activity Ratio, Debt ratio, Effectiveness Ratio, and Independence Ratio

ABSTRACT

This research aims to analyze financial performance which consists of the Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Activity Ratio, and Debt Ratio in municipal governments in Central Java Province for the period 2015-2019. This research uses descriptive analysis method to determine the development of financial performance from year to year. The results of this study indicate that the average performance of the independence ratio is around 39.01% - 46.18% which is included in the low criteria. for the average effectiveness ratio ranged from 99.06% - 109.40% in very effective criteria. And for the calculation of all activity ratios are less than 50%, including the bad criteria because the ratio ranges from 19.11% - 25.38%. The last of the debt ratio is included in the criteria for high loan repayment capacity with the calculation of the average ratio from year to year ranging from 1.52% - 2.23%, its mean that all cities have high capabilities. the financial performance of city governments in Central Java Province at generally good, even though it is in poor criteria, there is an increase in financial performance improvements during this research period.

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 23, 2014). Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Sebagai konsekuensi atas pemberian otonomi ke daerah, Pemerintah Daerah dituntut melaksanakan tugasnya secara baik dan transparan. Otonomi daerah ini merupakan pemberdayaan bagi daerah untuk dapat mengambil keputusan daerah secara lebih baik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Dengan otonomi ini juga pemerintah daerah dapat leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri, dan mempertanggung jawabkan kepada masyarakat (publik). Pertanggung jawaban pemerintah kepada publik yang berupa laporan keuangan

pemerintah yang bersih merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, salah satu alat untuk memfasilitasi terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang kompetitif yaitu laporan keuangan pemerintah daerah tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang akurat dengan anggaran, menilai kondisi dan hasil operasional, dan membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan mengenai keuangan dan ketentuan lain serta membantu mengevaluasi tingkat efisien dan efektivitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca dan pengguna laporan keuangan. Untuk mengetahui dan mengukur kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan dengan teknik analisis laporan keuangan terhadap anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolok ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, rasio utang dan rasio pertumbuhan (Halim, 2004). Jadi analisa kinerja keuangan sangat penting karena dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang, dan dapat menunjukkan arah capaian target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi kinerja, serta membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada, karena terselenggaranya *Good Governance* merupakan salah satu persyaratan bagi pemerintah dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan kegiatan pemerintah kota dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2014 - 2019. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Utang terhadap pendapatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Keuangan Pemerintah Kota yang dijadikan objek penelitian. Dari data tersebut akan dilakukan perhitungan dan analisis untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Dikarenakan pentingnya penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah, penelitian ini bertujuan untuk menelisik kinerja keuangan pemerintah kota di provinsi Jawa Tengah. Pemilihan sampel pemerintah kota digunakan dalam penelitian ini karena struktur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan menyatu dalam hal pembuatan kebijakan dan anggaran.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan umum laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan

keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (SAP No.1, paragraf 9):

- a. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- e. Menyediakan informasi cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan SAP –Akrual (PP Nomor 71, 2010) terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Adalah laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan, yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan ini merupakan laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Laporan Operasional
Laporan operasional adalah jenis laporan keuangan pemerintah (pusat/daerah) yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi, yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
4. Neraca
Neraca merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas, pada tanggal tertentu.
5. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos ekuitas awal, surplus atau defisit pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas.
6. Laporan Arus Kas
Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu,
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Jenis laporan pemerintah yang memuat catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggara,

laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Menurut Halim (2004), hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Indikator kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik salah satunya dapat dilihat dari nilai rasio keuangan. Berikut rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang tinggi, diharapkan daerah tidak akan lagi tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. “Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, melakukan investasi jangka panjang dan sebagainya” (Mahmudi, 2010).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk terus menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah. Rasio kemandirian keuangan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pusat, provinsi dan pinjaman. PAD merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kriteria kemandirian:

Rendah sekali	: 0% - 25%
Rendah	: 25% - 50%
Sedang	: 50% - 75%
Tinggi	: 75% - 100%

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Statistik deskriptif pada table 1 menunjukkan persebaran data dalam penelitian ini. Dapat dilihat bahwa data kemiskinan di 7 negara memiliki nilai rata-rata sebesar 23,27%, dengan tingkat kemiskinan terendah ialah pada Negara Kazakhstan di tahun 2017, dan tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Negara Mali 2015 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 47,2%. Untuk globalisasi ekonomi yang diprosikan dengan keterbukaan perdagangan, angka tertinggi sebesar 134,03 yang dimiliki oleh Negara Kyrgyzstan ditahun 2013, namun angka FDI terendah juga dimiliki oleh Kyrgyzstan di tahun 2017 yaitu sebesar -1,39.

Tabel 1. Deskriptif statistik

	Kemiskinan	Trade openes	FDI	IPM	Populasi
Mean	23,27	67,65	3,41	0,68	16,813
Median	25,4	59,97	2,66	0,69	16,658
Minimum	2,5	37,42	-1,39	0,41	14,811
Maksimum	47,2	134,03	17,13	0,81	19,405
Obs	40	40	40	40	40

Kemiskinan di tujuh negara anggota OKI memiliki tingkat fluktuasi yang berbeda-beda. Dapat kita lihat pada gambar 1, negara dengan kemiskinan tertinggi pada sampel adalah negara Mali, sedangkan negara dengan presentase tingkat kemiskinan yang cukup rendah adalah Kazakhstan. Negara Turki, Kyrgyzstan, dan Moldova memiliki trend kemiskinan yang fluktuatif pada periode penelitian 2013-2018 dimana trend kemiskinan mengalami kenaikan dan penurunan pada periode tersebut. Namun, di empat negara lainnya yakni Indonesia, Kazakhstan, Tajikistan, dan Mali memiliki trend yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa di empat negara yang memiliki trend kemiskinan menurun dianggap berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan di negaranya.

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan dalam penelitian guna mengukur sejauh mana potensi masing-masing daerah dapat digali dan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Menurut Mahmudi (2010) rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Namun,

untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas saja tidak cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien.

Kriteria Efektivitas:

Sangat Efektif	: > 100%
Efektif	: 100%
Cukup Efektif	: 90% - 100%
Kurang efektif	: 75% - 89%
Tidak efektif	: < 75%.

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Alokasi belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dibandingkan dengan total belanja dalam APBD. Dalam penelitian ini rasio Aktivitas diproses dengan Rasio Belanja Modal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja modal artinya persentase dana yang dialokasikan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin besar. Kriteria Rasio Aktivitas Tidak Baik (0% - 50%) dan Baik (50% - 100%)

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

d. Rasio Utang Terhadap Pendapatan (*Debt to Income Ratio*)

Rasio utang terhadap pendapatan merupakan kinerja pinjaman daerah. Rasio ini sangat bermanfaat bagi pihak eksternal terutama calon kreditor untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman. Semakin tinggi rasio ini maka semakin kecil kemampuan pemerintah daerah untuk mengembalikan pinjaman. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan total utang pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah.

$$\text{Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Total Utang Pemerintah Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian deskriptif yang meliputi pengumpulan data atau mempertanyakan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan kota di Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam ini adalah analisis deskriptif yang mencakup cara-cara pengumpulan, menyusun atau mengatur, mengelola, menyajikan dan menganalisis angka-angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai keadaan, peristiwa atau gejala tertentu sehingga ditarik pengertian atau makna tertentu

PEMBAHASAN

Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara dengan luas wilayah 32.800,69 km². Dalam segi demografi pada tahun 2018 jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan proyeksi Sensus Penduduk Tahun 2018 sebanyak 36.774.140 jiwa atau 13,52% dari jumlah penduduk Indonesia, terdiri dari laki-laki sebanyak 17.750.900 jiwa (49,58%) dan perempuan sebanyak 19.023.240 jiwa (50,42%), dengan sex ratio sebesar 98,%. Dibandingkan dengan proyeksi sensus penduduk tahun 2017, penduduk Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 0,15%. Kepadatan Penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2015 mencapai 1.038 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 35 Kabupaten/Kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Surakarta dengan kepadatan sebesar 11.634 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Blora sebesar 475 jiwa/km². Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Enam pemerintah kota tersebut adalah;

1. Kota Magelang, terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan
2. Kota Pekalongan, terdiri dari 4 kecamatan dan 27 kelurahan
3. Kota Salatiga, terdiri dari 4 kecamatan dan 23 kelurahan
4. Kota Semarang, terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan
5. Kota Surakarta, terdiri dari 5 kecamatan dan 54 kelurahan
6. Kota Tegal, terdiri dari 4 kecamatan dan 27 kelurahan

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiaya sendiri kegiatan pemerintah, baik dari segi pembangunan, maupun pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat dari segi financial. Berikut adalah kriteria dari rasio kemandirian;

Rendah sekali	: 0% - 25%
Rendah	: 25% - 50%
Sedang	: 50% - 75%
Tinggi	: 75% - 100%

Perhitungan rasio kemandirian pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2019 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1: Rasio Kemandirian Kota di Jawa Tengah

Kota	2015	2016	2017	2018	2019
	%	%	%	%	%
Magelang	37,23	36,08	39,14	40,35	43,73

Surakarta	39,88	32,92	42,52	40,79	40,87
Salatiga	31,36	31,23	32,62	32,18	36,11
Semarang	65,61	69,52	80,42	88,02	87,47
Pekalongan	27,44	26,92	29,12	26,47	30,04
Tegal	40,22	37,83	42,38	38,44	38,9
Rata-rata	40,29	39,08	44,37	44,38	46,19

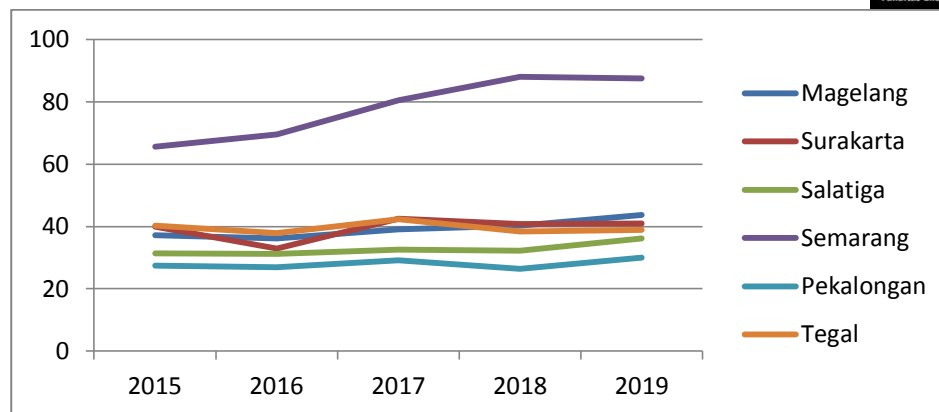
Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan rasio kemandirian pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dan penurunan selama periode 2015 – 2019. Dari 6 kota yang dijadikan objek dalam penelitian ini, tingkat kemandirian untuk 5 kota dari tahun 2015 - 2019 berada pada kisaran 26,92% - 43,73%, masuk dalam kriteria rendah. Artinya tingkat ketergantungan financial terhadap pusat masih tergolong tinggi. Tingkat kemandirian yang paling rendah 26,92% adalah kota Pekalongan dan kota Magelang sudah mendekati kriteria sedang dengan rasio kemandirian sebesar 43,73%. Untuk tingkat rasio kemandirian kota Semarang dalam periode 2015 – 2019 masuk ke dalam kriteria sedang untuk tahun 2015 dan 2016, dan masuk kriteria tinggi untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Artinya tingkat kemandirian financial untuk membiayai kegiatan pemerintah sudah sangat baik. Tingkat ketergantungan terhadap pusat sangat rendah. Secara umum tingkat kemandirian berdasarkan perkembangan selama lima tahun, kelima kota ini (Magelang, Surakarta, Salatiga, Pekalongan, dan Tegal) sudah menunjukkan peningkatan rasio kemandirian. Berdasarkan analisis ini, diharapkan pemerintah kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan rasio kemandirian financial dengan menggali lebih banyak lagi potensi yang ada di daerah masing-masing, sehingga tingkat ketergantungan financial terhadap pusat menjadi rendah. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, dengan tingkat kemandirian yang tinggi, pemerintah kota dapat lebih leluasa merencanakan kegiatan untuk daerahnya demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Gambaran perkembangan rasio kemandirian untuk pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2015 sampai dengan periode 2019 dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 menunjukkan grafik perkembangan tingkat kemandirian dari seluruh sampel dalam penelitian ini. Tingkat kemandirian tertinggi adalah kota Semarang, dan yang terendah adalah tingkat kemandirian kota Pekalongan. Tingkat kemandirian pemerintah kota selain kota Semarang rata-rata berfluktuasi cenderung smooth bila dibandingkan dengan fluktuasi kota Semarang yang mengalami peningkatan kemandirian yang tinggi pada tahun 2018.

Gambar 1. Grafik Perkembangan Rasio Kemandirian



Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Berikut kriteria Efektivitas:

- Sangat Efektif : > 100%
- Efektif : 100%
- Cukup Efektif : 90% - 100%
- Kurang efektif : 75% - 89%
- Tidak efektif : < 75%

Perhitungan rasio efektivitas pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2019 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

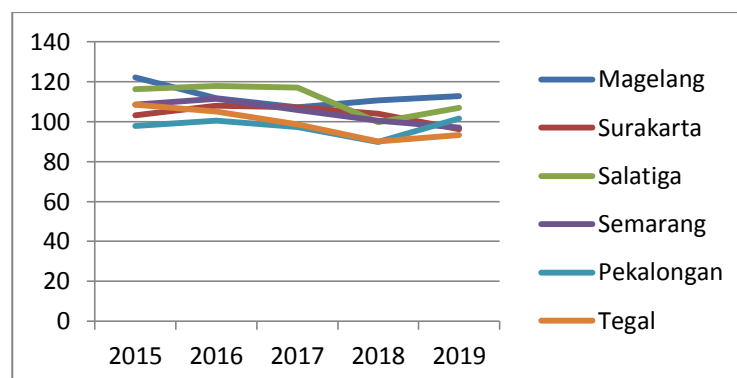
Tabel 2 : Rasio Efektivitas Kota di Jawa Tengah

Kota	2015	2016	2017	2018	2019
	%	%	%	%	%
Magelang	122,17	111,57	107,09	110,61	112,86
Surakarta	103,26	107,94	107,11	103,92	96,17
Salatiga	116,11	117,94	116,91	99,6	106,78
Semarang	108,54	111,56	105,88	100,55	97,09
Pekalongan	97,75	100,35	97,17	89,7	101,53
Tegal	108,59	105,07	98,68	90,03	93,16
Rata-rata	109,40	109,07	105,47	99,07	101,27

Sumber : Data diolah 2020

Efektivitas pemerintah kota dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan, rata-rata keseluruhan kota di provinsi Jawa Tengah sudah masuk ke dalam kriteria sangat efektif. Kriteria efektivitas Kota Pekalongan awal periode penelitian ini cukup efektif, selama perkembangan lima tahun menunjukkan peningkatan rasio menuju kriteria sangat efektif. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2015 rasio efektivitas Kota Pekalongan 97,75% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 101,53%, artinya kota Pekalongan berhasil menunjukkan kemampuannya dalam memobilisasi Penerimaan Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Namun hal ini bertolak belakang dengan Kota Tegal, perhitungan rasio Efektivitas kota Tegal selama tahun 2015-2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 dan 2016, kriteria rasio Efektivitas kota Tegal adalah sangat efektif dengan rasio

efektivitas 108,59% dan 105,07%, untuk tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi cukup efektif dengan rasio Efektivitas 98,68% untuk tahun 2017, 90,03% untuk tahun 2018, dan 93,16% untuk tahun 2019. Selanjutnya gambaran rasio efektivitas untuk pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Grafik Rasio Efektivitas

Gambar 2 diatas menunjukkan rasio efektivitas seluruh sampel dalam penelitian berada pada kondisi rata-rata sama. Penurunan kriteria efektivitas yang drastis terjadi di Kota Tegal pada tahun 2018 menjadi cukup efektif. Kota Salatiga juga mengalami penurunan tingkat efektivitas di tahun 2018. Selain terjadinya penurunan kriteria efektivitas, kota Pekalongan mengalami peningkatan efektivitas di tahun 2019.

Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas merupakan Rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja modal artinya persentase dana yang dialokasikan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin besar.

Kriteria Rasio Aktivitas

Tidak Baik : 0% - 50%

Baik : 50% - 100%

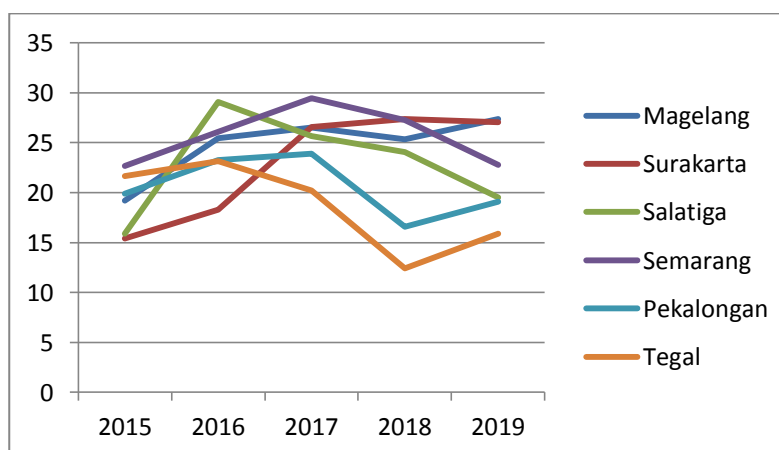
Perhitungan rasio Aktivitas untuk pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 : Rasio Aktivitas Kota di Jawa Tengah

Kota	2015	2016	2017	2018	2019
	%	%	%	%	%
Magelang	19,2	25,45	26,52	25,35	27,35
Surakarta	15,39	18,3	26,57	27,37	27,02
Salatiga	15,9	29,06	25,65	24,04	19,5
Semarang	22,69	26,11	29,47	27,27	22,77
Pekalongan	19,89	23,23	23,88	16,57	19,09
Tegal	21,64	23,14	20,22	12,4	15,87
Rata-rata	19,12	24,22	25,39	22,17	21,93

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan perhitungan rasio aktivitas pada tabel 3 diatas, tingkat rasio aktivitas untuk seluruh kota di provinsi Jawa Tengah dibawah 50%. Artinya seluruh pemerintah kota pada penelitian ini membelanjakan pendapatannya untuk belanja modal masih tergolong tidak baik. Tingkat rasio aktivitas terendah ada pada Kota Tegal yaitu sebesar 12,40% di tahun 2018 dan tingkat rasio aktivitas tertinggi sebesar 29,47% pada tahun 2017 untuk kota Semarang. Perkembangan rasio Aktivitas selama periode 2015 sampai 2019 sangat berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat perkembangan rasio aktivitas kota Tegal. Kota Magelang dan kota Surakarta mengalami peningkatan rasio aktivitas yang cukup tinggi, kota Salatiga mengalami peningkatan, sementara untuk kota Semarang dan kota Pekalongan meskipun berfluktuatif dapat dikatakan stabil dari tahun ke tahun. Rendahnya rasio aktivitas ini menggambarkan pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah masih belum membelanjakan pendapatannya untuk belanja modal secara optimal. Hal ini dapat disebabkan karena pemerintah daerah masih kekurangan Aparatur Sipil Negara yang bersertifikasi dan berkualifikasi menjadi kendala untuk menentukan belanja modal yang tepat. Selain itu, masih rendahnya kemandirian finansial daerah juga dapat menjadi penyebab rendahnya pengalokasian belanja modal untuk daerah. Berikut dapat dilihat gambaran perkembangan rasio aktivitas selama periode 2015 sampai 2019 pada gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Grafik Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas seluruh sampel dalam penelitian ini masuk dalam kriteria tidak baik. Dari gambar 3 diatas dapat dilihat terjadi penurunan rasio yang sangat tajam untuk kota Tegal dan kota Pekalongan pada tahun 2018.

Rasio Utang

Rasio utang sangat bermanfaat bagi pihak eksternal terutama calon kreditor untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman. Semakin tinggi rasio ini maka semakin kecil kemampuan pemerintah daerah untuk mengembalikan pinjaman. Perhitungan rasio Utang untuk pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

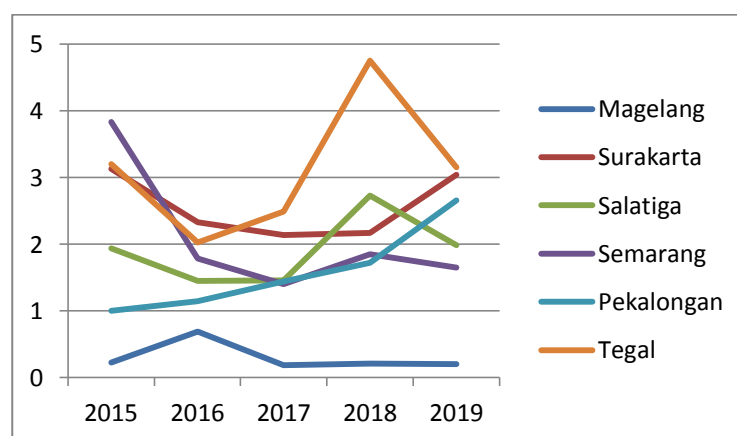
Tabel 4 : Rasio Utang Kota di Jawa Tengah

Kota	2015	2016	2017	2018	2019
------	------	------	------	------	------

	%	%	%	%	%
Magelang	0,23	0,69	0,19	0,21	0,2
Surakarta	3,13	2,33	2,14	2,17	3,04
Salatiga	1,94	1,45	1,46	2,73	1,99
Semarang	3,83	1,79	1,4	1,85	1,65
Pekalongan	1	1,15	1,44	1,72	2,66
Tegal	3,2	2,03	2,49	4,75	3,15
Rata-rata	2,22	1,57	1,52	2,24	2,12

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat dijelaskan bahwa kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman seluruh pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dari rasio utang tertinggi adalah 3,83% dan rasio utang terendah adalah 0,19%. Artinya seluruh pemerintah kota dalam penelitian ini memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman sangat tinggi. Dilihat dari perkembangan tingkat kemampuan mengembalikan pinjaman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan yang menunjukkan penurunan rasio utang dari tahun ke tahun. Hal ini dapat disebabkan karena daerah dapat menekan jumlah utang dari tahun ke tahun dan memaksimalkan pemenuhan kebutuhan belanja daerah dengan pendapatan daerah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Gambaran perkembangan rasio utang ini dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini.



Gambar 4. Grafik Rasio Utang

Dari gambar 4 diatas, dapat dilihat untuk tingkat pengembalian utang yang sangat baik dimiliki oleh kota Magelang meskipun tingkat pengembalian untuk seluruh sampel dalam penelitian sangat tinggi. Tingkat pengembalian yang sangat berfluktuatif tinggi meskipun tingkat pengembalian sangat tinggi dialami oleh Kota Tegal yang terjadi pada tahun 2018.

SIMPULAN

Analisis kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah untuk rasio kemandirian masih tergolong kriteria rendah, hanya kota Semarang yang sudah mencapai kriteria tinggi. Untuk kinerja mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, kriteria rasio efektivitas seluruh kota dalam penelitian ini sudah sangat efektif yang artinya sudah sangat baik dalam

memobilisasi PAD sesuai dengan ditargetkan. Namun demikian, untuk rasio aktivitas, seluruh kota masih masuk dalam kategori tidak baik karena rasio yang diperoleh untuk rasio aktivitas masih dibawah 50%. Analisis kinerja terakhir dalam penelitian ini menunjukkan kemampuan seluruh kota yang sangat tinggi dalam mengembalikan pinjaman, hal ini dapat dilihat dari kecilnya rasio utang setiap daerah. Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah masih perlu meningkatkan kinerja keuangannya agar kegiatan dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal. Pelaksanaan otonomi yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan baik sehingga *good governance* yang bersih dan transparan dapat tercapai.

KETERBATASAN

Penelitian ini masih terbatas untuk menganalisis empat kinerja keuangan pada pemerintah kota di provinsi Jawa Tengah, untuk penelitian selanjutnya dapat meluaskan objek penelitian dan menganalisis kinerja keuangan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badri, Juarsa. (2014). *Analisis Potensi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Solok*, Jurnal IPTEKS Terapan, Vol. 8 No. 14.
- Halim, Abdul. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: YKPN
- Halim. Abdul. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Empat. Jakarta. Salemba Empat
- <http://absi.maksi.feb.ugm.ac.id/journal/?page=detail&docID=169>
- <https://journal.unimal.ac.id/visi/article/view/211>
- [https://www.researchgate.net/publication/312351471 Analisis Potensi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Solok](https://www.researchgate.net/publication/312351471_Analisis_Potensi_dan_Pertumbuhan_Ekonomi_Daerah_Kabupaten_Solok)
- Indonesia (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Indonesia (2010). UU Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Indonesia (2014). Undang – Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Kuncoro, Mudrajad. (2014). *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Yogyakarta : Erlangga.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Panduan bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik Edisi Kedua*. Yogyakarta : UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Maisyuri, (2017). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe. Jurnal Visioner & Strategies. Vol 6. No 1.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Empat*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Rahman, Abdul. (2012). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemekaran (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia). *Journal Accounting and Business Informations System*, Vol 2. No 1.